

**LAPORAN**  
**PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI**  
**PUBLIK (FKP)**



**BPTU HPT PADANG MENGATAS**  
**DIREKTORAT JENDRAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN**  
**HEWAN**  
**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**TAHUN 2024**

## DAFTAR ISI

### Halaman Sampul

### Daftar Isi

#### A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Tujuan dan Manfaat
3. Ruang Lingkup

#### B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
2. Penyelenggara dan Peserta FKP
3. Metode Pelaksanaan FKP
4. Susunan Acara FKP

#### C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah
2. Rencana Aksi

#### D. PENUTUP

**LAMPIRAN I** Berita Acara yang Ditandatangani

**LAMPIRAN II** Salinan Daftar Hadir

**LAMPIRAN III** Surat Undangan

**LAMPIRAN IV** Dokumentasi Kegiatan

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada BPTU HPT Padang Mengatas

### **2. Tujuan dan Manfaat**

#### **a. Tujuan**

Dalam upaya peningkatan peran dan kontribusi BPTUHPT Padang Mengatas untuk pengembangan peternakan khususnya sapi potong dan sapi perah tahun 2025, BPTUHPT Padang Mengatas berkomitmen memberikan pelayanan, pengembangan serta peningkatan SDM peternakan. Tujuan pengembangan peternakan khususnya sapi

potong dan sapi perah di BPTUHPT Padang Mengatas menjadi balai pembibitan yang modern menghasilkan bibit yang bermutu tinggi dan dapat meningkatkan minat investasi bidang peternakan adalah:

1. Peningkatan efisiensi produksi bibit sapi potong dan sapi perah
2. Peningkatan produksi bibit ternak yang berkualitas dan bersertifikat
3. Peningkatan wawasan dan pengetahuan SDM peternakan
4. Sarana promosi bioteknologi produksi dan agribisnis peternakan
5. Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat

b. Manfaat

1) Secara Umum

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

2) Penyelenggara Pelayanan

- a) memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
- b) memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
- c) mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
- d) mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- e) sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
- f) memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

3) Publik

- a) ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik;
- b) memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
- c) memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
- d) menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;

- e) meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

### **3. Ruang Lingkup**

Peningkatan peran dan kontribusi BPTUHPT Padang Mengatas untuk pengembangan peternakan pelayanan khususnya sapi potong dan sapi perah sistem peternakan yang berbasis teknologi diharapkan dapat mengedukasi masyarakat dalam usaha peternakan serta dapat menimbulkan motivasi bagi pelaku usaha untuk berinvestasi dibidang peternakan sapi potong dan sapi perah terutama bagi kaum milenial. Ruang lingkup kegiatan ini adalah pengembangan pusat Pembibitan Ternak Unggul yang Modern dalam peningkatan populasi dan produksi daging dalam negeri.

## **B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP**

### **1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

- a. Waktu Penyelenggaraan

Hari : Senin

Tanggal : 28 Oktober 2024

- b. Tempat Pelaksanaan

Aula Simmental BPTU HPT Padang Mengatas

### **2. Penyelenggara dan Peserta FKP**

- a. Penyelenggara

BPTU HPT Padang Mengatas

- b. Peserta FKP

1. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat
2. Dekan Fakultas Peternakan Universitas Andalas
3. Dekan Fakultas MIPA Universitas Negeri Padang
4. Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
5. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Limapuluh Kota
6. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Payakumbuh
7. Kepala BIBD Tuah Sakato
8. Kepala Balai Pembibitan Ternak Ruminansia Air Runding
9. Pimpinan Sirukam Dairy Farm
10. Komandan Denzipur II
11. Kapolsek Luak

12. Koramil Luak
13. Camat Luak
14. Camat Lareh Sago Halaban
15. Kepala Sekolah SPP Negeri Padang Mengatas
16. Walinagari Mungo
17. Walinagari Bukit Sikumpar
18. Walinagari Batupayung
19. Walinagari Sungai Kamuyang
20. Walinagari Labuah Gunung
21. Walinagari Balai Panjang
22. Kelompok Tani Saiyo Sakato Balai Panjang

### **3. Metode Pelaksanaan FKP**

Pelaksanaan FKP dilakukan secara tatap muka atau *offline*.

Metode dilakukan dengan pemaparan atau presentasi Pelayanan Pengembangan Peternakan dan dilanjutkan dengan diskusi

#### 4. Susunan Acara FKP

Jam	Kegiatan	Keterangan
09.00 - 09.20	Pembukaan MC, menyanyikan lagu Indonesia Raya+ Mars BPTU	
09.20 - 09.30	Pembacaan Doa	Dipandu MC
09.30 - 10.00	Sambutan Kepala Balai	
10.00 - 10.30	Penyampaian Pelayanan Balai dan rencana kegiatan tahun 2025	
10.30 - 11.30	Diskusi	

### C. HASIL PELAKSANAAN FKP

#### 1. Identifikasi Masalah

Adapun hasil Forum Kolnsultasi Publik tentang Pelayanan Pengembangan Peternakan dan rencana kegiatan tahun 2025 di BPTU HPT Padang Mengatas sebagai berikut :

1. Pimpinan memaparkan terkait di BPTU HPT Padang Mengatas kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, Dekan Fakultas Peternakan Universitas Andalas, 3.Dekan Fakultas MIPA Universitas Negeri Padang, 4.Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Limapuluh Kota, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Payakumbuh, Kepala BIBD Tuah Sakato, Kepala Balai Pembibitan Ternak Ruminansia Air Runding, Pimpinan Sirukam Dairy Farm Denzipur 2 /PS, Danramil 04 Luak, Kapolsek Luak, Kepala SMK PP Padang Mengatas, Camat Luak, Camat Lareh Sago Halaban, Wali Nagari dan Jorong yang ada di Sekitar Wilayah BPTU HPT Padang Mengatas.
2. Pelayan Pengembangan Peternakan dan rencana kegiatan tahun 2025 di BPTU HPT ini membahas beberapa hal diantaranya:
  - a. Pemaparan terkait dengan konsultasi publik pelayanan pengembangan peternakan oleh KTU BPTU HPT Padang Mengatas.
  - b. Diskusi forum untuk meningkatkan layanan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan di BPTU HPT Padang Mengatas.
3. Setiap konsultasi pelayanan publik dan pengembangan peternakan sapi potong dan sapi perah harus dilaporkan dan dirapatkan setiap minggunya.
4. BPTU HPT Padang Mengatas dalam rangka konsultasi pelayanan publik dan pengembangan peternakan sapi potong dan sapi perah mempertimbangkan aspek lingkungan, social, dan memitigasi dampak yang ditimbulkan

## 2. Rencana Aksi

*Stakeholder* (Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, Perguruan Tinggi, Camat, Wali Nagari, Wali Jorong) yang hadir sepakat, berkomitmen, dan mendukung pelaksanaan Pelayanan Publik dan Pengembangan Peternakan Sapi Potong dan Sapi Perah di BPTU HPT Padang Mengatas

## D. PENUTUP

Dengan telah dilaksanakannya FKP diharapkan BPTU HPT Padang Mengatas berkomitmen untuk meningkatkan layanan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan, selalu membantu Masyarakat terkait dengan pengembangan peternakan, terus aktif melakukan pembinaan pengembangan peternakan baik disekitar lingkup BPTU HPT Padang Mengatas maupun diluarnya serta akan selalu mengoptimalkan pelayanan secara elektronik.

## LAMPIRAN I Berita Acara yang Ditandatangani

### FORMAT BERITA ACARA PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN A  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jalan Damai Sejahtera No. 1 Kabupaten A

#### BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

Pada hari ini, Senin 28 Oktober 2024, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Administrasi Kependudukan oleh BPTU HPT Padang Mengatas. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Sektor peternakan yang ada disekitar BPTU HPT Padang Mengatas sebaiknya lebih maju dan berkembang.	Semua informasi-informasi dilaksanakan dengan mengirim surat sesuai ketentuan yang berlaku	Setiap hari
2.	Bantuan atau hibah yang diberikan oleh BPTU HPT Padang Mengatas harus di kontrol	BPTU HPT Padang Mengatas akan mengirimkan langsung tim ke kelompok-kelompok tani sekitaran BPTU	Setiap hari
3.	Adanya kerjasama BPTU HPT Padang Mengatas dengan instansi berupa Dinas, , Kelompok-kelompok tani terutama dalam hal penyediaan pakan, pembuatan pakan	Semua informasi-informasi dilaksanakan dengan mengirim surat sesuai ketentuan yang berlaku	Perbulan
4.	Adanya kerjasama BPTU HPT Padang Mengatas dengan SMK dan Perguruan Tinggi, serta Magang,	Adanya pembaharuan kerjasama dan menghitung kebutuhan sarana dan prasarana BPTU	Perbulan

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Dekan Fakultas Universitas Negeri Padang  Rini Elisia	Kepala Balai  Dani Kusworo, S.Pt. M, Si
--	---

\*) Penandatanganan adalah Pimpinan Instansi dan Penyelenggara Pelayanan.

LAMPIRAN II Daftar Hadir

**DAFTAR HADIR**  
**BPTUHPT PADANG MENGATAS**

Tanggal :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Kabul Dinar A	Demagar 3/ps	
2	SUHARMIN	ICorani, OGI/wak	
3	Nelia irawati	Ketua kel Saiyo Sakato	
4	Suci Ananda Hemi	Selek teri Saiyo Sakato	
5	METRIS DORNA	Polale Luhat	
6	DARWIS	KTK. Yanhek	
7	Debby Sukriani	Politani Payakumbuh	
8	Marganti Zen	Vuud	
9	Jumadi sp.	KTK sarana.	
10	Muhammad Suhardi	W.N Mungo	
11	Nurhayati	Fatema Unand.	
12	Boi wan.	PT. SIRUKAM LN	
13	Artif Priadi	FATIRMA	
14	Eli putra	WN. Bukit Siga	
15	Rahmad Rizal	WN Batu payung	
16	CEPATAN	Magai Sungai Kamuyang	
17	Khairul Hadi	WNI Labuah Gunung	
18	WNI PEBRINA	SUK BP N Pkg Mengat	
19	Rahmatasyac	D. perfa PK	
20	DEARMAR JAMAL	UPRO.T. Reminasi	
21	Abu Bakar Syukur	—	
22	RIFQI ELFAJRI	Warbutnak	
23	Romi Jarus	Agroindustri LIMP	
24	Rini Elisia	Agroindustri UMP	
25	Risvatinia	Sele Cam 2SH	
26	Eva Maria Pirbas	Kasi Pemerintahan	
27	Hadi Lentasa	Staf camat LSH	
28	IDRIS	wali nagari BLP	

29	Ryachelumi	STAFF Nagai	
30	<del>Erti Rahayu</del>	B1. Pany	
31	Erti Rahayu	BPTSD Tich Sakato	ER
32	Rera Gustriana	BPTSD TS	ER.
33	Riswandi	Wasbitnah	
34	Jani auto	Sekdis Dynakentem	Jf.
35	Nela Muisan	DPKU OB Feh	
36			

## LAMPIRAN III Surat Undangan



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PADANG MENGATAS

Jl. Raya Payakumbuh – Lintau, K.M. 9 Pekan Sabtu, Kec. Luak Kab. Lima Puluh Kota  
PO BOX 03, Payakumbuh 26201  
Telefon 0752-759315, Faksimile 0752-759369 e-mail: bptu\_patas@yahoo.com

Nomor : 1968/HM.240/F2.G/10/2024 25 Oktober 2024  
Lampiran : 1 Lembar  
Hal : Pertemuan Forum Konsultasi Publik  
Pelayanan Pengembangan Peternakan

Kepada Yth.  
**(Mohon Melihat lampiran)**

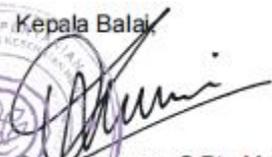
di  
Tempat

Dalam upaya peningkatan peran dan kontribusi BPTUHPT Padang Mengatas untuk pengembangan peternakan khususnya sapi potong dan sapi perah, BPTUHPT Padang Mengatas berkomitmen memberikan pelayanan, pengembangan serta peningkatan SDM peternakan. Berkaitan dengan hal tersebut, BPTUHPT Padang Mengatas menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik terkait pelayanan dan pengembangan peternakan tahun 2025, yang akan dilaksanakan, pada:

Hari/Tanggal : Senin, 28 Oktober 2024  
Waktu : Jam 09.00 WIB – Selesai  
Tempat : Aula Simental BPTUHPT Padang Mengatas

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap kehadiran Bapak/Ibu dalam kegiatan dimaksud. Untuk konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi layanan WA BPTUHPT Padang Mengatas (082169402404).

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Kepala Balai  
  
Dan Kusworo, S.Pt., M.Si  
NIP. 19790214 201101 1 007

Tembusan Yth.  
- Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan  
- Sekretaris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan  
- Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan



TIDAK MENERIMA SUAP, PUNGLI DAN GRATIFIKASI DALAM PELAKSANAAN TUGAS



TIDAK MENERIMA SUAP, PUNGLI DAN GRATIFIKASI DALAM PELAKSANAAN TUGAS



## DAFTAR UNDANGAN

1. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat
2. Dekan Fakultas Peternakan Universitas Andalas
3. Dekan Fakultas MIPA Universitas Negeri Padang
4. Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
5. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Limapuluh Kota
6. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Payakumbuh
7. Kepala BIBD Buah Sakato
8. Kepala Balai Pembibitan Ternak Ruminansia Air Runding
9. Pimpinan Sirukam Dairy Farm
10. Komandan Denzipur II
11. Kapolsek Luak
12. Koramil Luak
13. Camat Luak
14. Camat Lareh Sago Halaban
15. Kepala Sekolah SPP Negeri Padang Mengatas
16. Walinagari Mungo
17. Walinagari Bukit Sikumpar
18. Walinagari Batupayung
19. Walinagari Sungai Kamuyang
20. Walinagari Labuah Gunung
21. Walinagari Balai Panjang
22. Kelompok Tani Saiyo Sakato Balai Panjang

## LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan











